

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693123/2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (135) | KEMENTERIAN HUKUM |
| 2. Unit Organisasi | : | (11) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. Provinsi | : | (33) | PAPUA BARAT |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (693123) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT |
| Sebesar | : | Rp. 892.695.000 | (DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	892.695.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- | | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN MANOKWARI | (065) Rp. | 892.695.000 |
|-------------------|-----------|-------------|

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

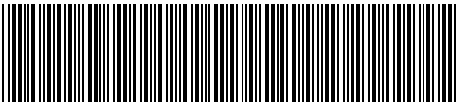
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2025



Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	127.589.000
BB.7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	127.589.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	765.106.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	765.106.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2025
I A. INFORMASI KINERJA



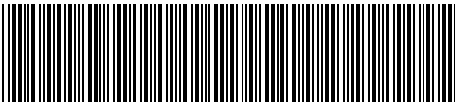
DS:2907-9990-1051-1891

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi			127.589.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			127.589.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan			
		2. 02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	23.639.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	23.639.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	103.950.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	103.950.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			765.106.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			765.106.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah			
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi			
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah			
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4,00	Lembaga	68.740.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	4,00	Lembaga	68.740.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat	62.660.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	46.730.000
		02 BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	5,00	Kelompok Masyarakat	15.930.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2907-9990-1051-1891

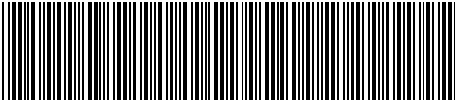
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat					Kelompok Masyarakat		
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	1,00	Orang	62.135.000
Rincian Output		:	01 BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah	1.00	Orang	62.135.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	5,00	Lembaga	83.491.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	5.00	Lembaga	83.491.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	8.700.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	1.00	dokumen	8.700.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	39.360.000
Rincian Output		:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	1.00	Laporan	39.360.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	47,00	Orang	376.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	47.00	Orang	376.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	6,00	Kelompok Masyarakat	64.020.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	6.00	Kelompok Masyarakat	64.020.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2025
I B. SUMBER DANA



DS:2907-9990-1051-1891

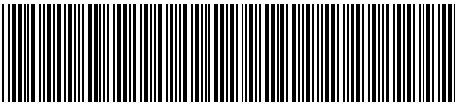
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	892.695.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	892.695.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



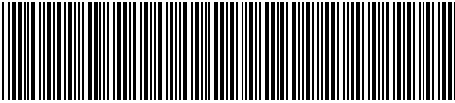
DS:2907-9990-1051-1891

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693123	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT	-	882.695	10.000	-	-	892.695	33 . 51	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	127.589	-	-	-	127.589		
7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	127.589	-	-	-	127.589		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	23.639	-	-	-	23.639		
01 RM		-	23.639	-	-	-	23.639		
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	103.950	-	-	-	103.950		
01 RM		-	103.950	-	-	-	103.950		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	755.106	10.000	-	-	765.106		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	755.106	10.000	-	-	765.106		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	58.740	10.000	-	-	68.740		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



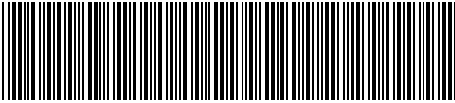
DS:2907-9990-1051-1891

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM 7136.BDD	RM	-	58.740	10.000	-	-	68.740	065@	
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	62.660	-	-	-	62.660	33 . 51	
01 RM 7136.BIB	RM	-	62.660	-	-	-	62.660	065@	
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	62.135	-	-	-	62.135	33 . 51	
01 RM 7136.BIC	RM	-	62.135	-	-	-	62.135	065@	
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	83.491	-	-	-	83.491	33 . 51	
01 RM 7136.BMA	RM	-	83.491	-	-	-	83.491	065@	
	Data dan Informasi Publik (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	8.700	-	-	-	8.700	33 . 51	
01 RM	RM	-	8.700	-	-	-	8.700	065@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2907-9990-1051-1891

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

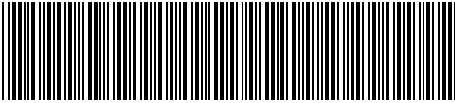
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	39.360	-	-	-	39.360	33 . 51	
01 RM		-	39.360	-	-	-	39.360	065@	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	376.000	-	-	-	376.000	33 . 51	
01 RM		-	376.000	-	-	-	376.000	065	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	64.020	-	-	-	64.020	33 . 00	
01 RM		-	64.020	-	-	-	64.020	065	
JUMLAH		-	882.695	10.000	-	-	892.695		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2907-9990-1051-1891

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (693123) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

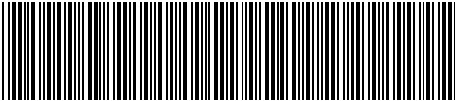
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693123	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	10.000	8.235	132.745	119.811	88.030	95.824	56.590	103.020	149.360	33.080	49.000	47.000	892.695
		BELANJA BARANG	476	7.759	132.745	119.811	88.030	95.824	56.590	103.020	149.360	33.080	49.000	47.000	882.695
		BELANJA MODAL	9.524	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
		135.11.BB.7133 Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	2.400	3.365	0	38.030	17.874	49.590	0	0	16.330	0	0	127.589
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	2.400	3.365	0	38.030	17.874	49.590	0	0	16.330	0	0	127.589
135.11.BF.7136		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	10.000	5.835	129.380	119.811	50.000	77.950	7.000	103.020	149.360	16.750	49.000	47.000	765.106
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	476	5.359	129.380	119.811	50.000	77.950	7.000	103.020	149.360	16.750	49.000	47.000	755.106
		53 BELANJA MODAL	9.524	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2025
IV A. B L O K I R



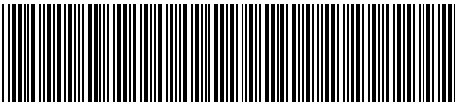
DS:2907-9990-1051-1891

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693123] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693123	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 182.305	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 182.305	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.590
7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.840	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.390
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 340	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.295
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.120	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.100
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 255	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.760
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 340
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.345		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2025
IV A. B L O K I R



DS:2907-9990-1051-1891

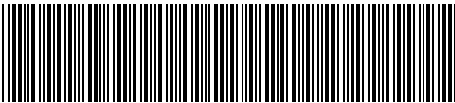
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693123] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7136.BMA	Data dan Informasi Publik 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.250 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.320 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.360 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693123/2025
IV B. C A T A T A N



DS:2907-9990-1051-1891

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693123] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001